

**LAPORAN PELAKSANAAN RESES
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
MASA RESES KEDUA TAHUN SIDANG 2023/2024**

Disampaikan oleh : Hj. Nurul Hidayah, SH, M.Si
Dalam : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah
Hari/Tanggal : 26 Februari 2024

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Yth. Saudara Ketua dan para wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yth. Segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yth. Segenap jajaran eksekutif di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Serta Rekan-rekan wartawan dan segenap tamu undangan yang berbahagia.

Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang dikasihi oleh Allah SWT,

Mengawali laporan hasil pelaksanaan reses Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada masa persidangan Kedua Tahun 2023/2024, perkenalkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk bersama-sama menyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan

rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga pola kepemimpinannya dapat kita jadikan tauladan dalam membangun masa depan masyarakat Jawa Tengah yang lebih baik.

Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan hasil laporan reses ini yang merupakan kumpulan hasil penyerapan aspirasi anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap masyarakat di Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka telah menciptakan persaingan baik sesama caleg di internal partai maupun dengan caleg beda partai. Gesekan, perebutan ceruk pasar, bahkan saling tumpuk menumpuk menjadi fenomena umum. Banyak incumbent tumbang dan banyak juga pemain baru gagal memperebutkan kursi. Politik transaksional begitu vulgar dan bahkan yang paling tinggi potensial yang dipilih. Banyak pemilih yang menerima lebih dari satu caleg. Fenomena ini tentu mencederai demokrasi dan merusak mental masyarakat secara sistematis dan massif.
2. Banyak anak-anak siswa dan siswi mulai dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA yang kecanduan hp android untuk melihat konten di youtube, Instagram, tiktok, game dsb. Untuk itu para orang tua berharap Pemerintah Provinsi dapat mengeluarkan regulasi agar semua Lembaga Pendidikan melakukan pendidikan cara penggunaan hp android yang positif dan tidak kecanduan.

3. Maraknya isu jual beli kursi perguruan tinggi negeri terutama fakultas kedokteran telah mencederai dunia Pendidikan di tanah air. Tingginya bursa biaya masuk fakultas kedokteran PTN telah menciptakan Pendidikan yang diskriminatif dan hanya pro orang kaya. Dengan kata lain orang miskin dilarang masuk fakultas kedokteran. Untuk itu masyarakat berharap Pemerintah Provinsi turun tangan untuk menciptakan dunia Pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif.
4. Pendataan warga penerima bantuan dari Pemerintah yang dilakukan aparat kelurahan/desa seringkali didasarkan pada saran atasan atau selera pendata yang subyektif dan tidak didasarkan pada kriteria obyektif. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bantuan tidak tepat sasaran. Untuk itu masyarakat berharap agar Pemerintah melakukan verifikasi faktual terhadap data yang diusulkan oleh kelurahan/desa.
5. Banyaknya potensi desa wisata di Jawa Tengah yang belum mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah. Padahal jika desa wisata bagus, maju, terkenal dan viral bisa mendorong tumbuhnya perekonomian di desa wisata tersebut. Untuk itu masyarakat berharap agar Pemerintah Provinsi dapat menginventarisir potensi desa wisata dan dapat mendorong serta memfasilitasi agar desa wisata tumbuh dan berkembang demi kemajuan perekonomian pedesaan

6. Program RTLH mendapatkan apresiasi dari masyarakat miskin yang rumahnya kurang layak huni, namun program ini banyak yang tidak terealisasi. Untuk itu Pemerintah Provinsi diharapkan melakukan sosialisasi agar program RTLH dapat terealisasi dengan baik.
7. Kelangkaan pupuk di musim tanam menjadi persoalan yang terus berulang. Meski petani terus berteriak namun persoalan ini belum juga ada solusi yang menggembirakan. Para petani berharap perlu adanya penataan dan tata kelola distribusi pupuk agar masyarakat petani mudah mendapatkan pupuk disaat musim tanam.
8. Sering anjloknya harga hasil pertanian di musim panen membuat masyarakat petani gelisah dan inilah salah satu pendorong banyaknya anak para petani yang memilih menjadi buruh pabrik ketimbang bertani. Untuk itu masyarakat berharap agar Pemerintah menetapkan standar harga hasil pertanian sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap para petani.
9. Penyuluh pertanian mestinya menjadi pemandu para petani dalam bercocok tanam. Untuk itu masyarakat berharap pemerintah provinsi mengkoordinir agar dinas pertanian provinsi dan kab/kota untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada para petani di desa agar hasil pertaniannya berkualitas dan hasil produksinya meningkat.
10. Kerusakan jalan terutama di jalur pantura telah menyebabkan antara lain; meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas akibat menghindari banyaknya lubang, kerusakan kendaraan para

pengguna jalan dan kemacetan panjang. Hal ini menyebabkan kerugian khususnya bagi masyarakat pengguna jalan yang selama ini setia membayar pajak.

11. Tingginya curah hujan di musim hujan beberapa minggu yang lalu telah menyebabkan hampir semua sungai dan kali di Jawa Tengah mengalami sedimentasi yang sangat tinggi yang berdampak berkurangnya volume air di daerah aliran sungai. Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi segera melakukan normalisasi semua sungai dan kali yang berada di Jawa Tengah.
12. Fenomena banjir adalah peristiwa rutin yang dialami masyarakat di musim hujan, apalagi jika sungai mengalami pendangkalan akibat sampah dan material tanah maupun pasir baik dari hulu maupun longsor bantaran sungai. Begitu juga rob sepanjang tahun yang dialami masyarakat pesisir utara membuat resah dan sedih namun mereka tidak punya pilihan selain bertahan dengan kondisi yang ada. Untuk itu mereka berharap pemerintah provinsi serius menangani masalah banjir dan rob yang menimpa masyarakat.
13. Pembangunan jalan desa, jalan usaha pertanian, pembangunan drainase, talud desa, pembangunan sarana prasarana pengembangan wisata desa, pembangunan embung desa harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam membantu kesejahteraan masyarakat desa.
14. Kerusakan jalan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah disebabkan 4 faktor ; (1) kendaraan angkutan barang yang melebihi tonase, (2) kualitas jalan yang kurang baik, (3) Sikap Pemerintah, (4) faktor alam seperti banjir dan bencana alam. Untuk itu masyarakat

berharap saudara Gubernur dapat memberikan sanksi berupa penghentian izin operasi kepada perusahaan bongkar muat (PBM) dan trucking yang angkutan barangnya melebihi tonase, memblacklist kontraktor jalan yang kualitas pekerjaannya buruk dan atau tidak memenuhi standar. Tanpa ketegasan dan sanksi Pemerintah kondisi jalan tidak akan bertahan lama.

Demikianlah Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Harapan kami semoga laporan ini dapat dijadikan acuan Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Masruhan Samsurie

dr. Hj. Sholeha Kurniawati